

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Destinasi pariwisata merupakan lokasi produksi, konsumsi dan pola-pola pergerakan wisata (Davidson dan Maitland, 1997). Selain itu destinasi pariwisata juga sebagai tempat hidup masyarakat untuk bekerja serta melakukan kegiatan sosial dan budaya. Hal tersebut juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menyatakan bahwa destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Dengan demikian masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu destinasi pariwisata, sehingga dalam pengembangan destinasi pariwisata wajib mempertimbangkan berbagai elemen masyarakat.

Dogra dan Gupta (2012) menyebutkan bahwa masyarakat memiliki posisi strategis dalam suatu destinasi pariwisata. Oleh karena itu, keberlanjutan destinasi pariwisata sangat tergantung dari tingkat keterlibatan masyarakatnya dalam pembangunan destinasi pariwisata. Munculnya fenomena pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat merupakan kritik atas pengelolaan wisata yang dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat dan dipandang kurang mampu memberdayakan masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) merupakan konsep pengelolaan kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya. Konsep pariwisata berbasis masyarakat berkesesuaian dengan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang memerlukan partisipasi masyarakat.

Natori (2001) mendefinisikan pariwisata berbasis masyarakat sebagai aktivitas masyarakat setempat untuk mempromosikan pertukaran dan untuk menciptakan sebuah komunitas yang penuh dengan energi oleh alam sepenuhnya, pemanfaatan budaya, sejarah, industri, orang-orang yang berbakat dan sumber daya lokal lainnya.

Masyarakat di dalam destinasi pariwisata yang kemudian disebut dengan masyarakat lokal mempunyai potensi berupa beragam aktivitas yang dapat dikreasikan menjadi produk pariwisata. Budaya lokal, tinggalan masyarakat, serta festival menyediakan keunikan dan sesuatu yang baru dari perspektif wisatawan. Kabupaten Limapuluh Kota memiliki potensi daya tarik yang dapat menjadikan pariwisata sebagai program unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, seperti keindahan alam, kekayaan kultur dan budaya, kesejarahan dan aneka kuliner khasnya. Dalam kebijakan pembangunan sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menjadikan konsep Nagari Wisata sebagai salah satu strategi yang digunakan agar perkembangan pariwisata berimplikasi positif terhadap perekonomian masyarakat sekaligus dapat memelihara lingkungan secara berkelanjutan. Melalui nagari wisata, pariwisata diharapkan bergerak dengan keberpihakannya kepada semangat, dimana pariwisata sebagai penyerap tenaga kerja pedesaan, sebagai generator pertumbuhan ekonomi wilayah, dan sebagai alat pengentasan kemiskinan (*pro job, pro growth, dan pro poor*).

Objek Wisata Kapalo Banda, Nagari Taram merupakan salah satu nagari / desa yang tergabung dalam klaster destinasi wisata yang memiliki potensi pengembangan yang sangat pesat. Secara Geografis Kapalo Banda hanya berjarak  $\pm 10$  km dari objek wisata Lembah Harau yang merupakan Destinasi Unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota. Aksesibilitas menuju Kapalo Banda relative mudah, hanya berjarak  $\pm 8$  km dari Jalan Utama Provinsi. Sejak Nagari Taram diberi penghargaan sebagai pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Berprestasi Juara I Tingkat Regional I Nasional dari KEMENDAGRI, kunjungan wisatawan domestik ke objek wisata Kapalo Banda. Aktifitas ekowisata dan Wisata air di Kapalo Banda Taram sangat memungkinkan untuk dikembangkan dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat (*Community based tourism*). Destinasi wisata ini termasuk salah satu dari 244 Desa Wisata di Indonesia menerima Program Pendampingan dan Penyaluran bantuan dari Kementerian Pariwisata sampai dengan tahun 2024.

Bagaimana peran masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata ini, merupakan pertanyaan umum yang perlu mendapatkan bukti empiris untuk

menjawabnya. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata : Study Kasus Objek Wisata Kapalo Banda Taram, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

### **B. Rumusan Masalah**

Lebih spesifik permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk peran masyarakat lokal terhadap objek wisata kapalo banda sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan.
2. Dengan berkembang objek wisata Kapalo Banda, manfaat apa yang didapatkan oleh masyarakat lokal.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan apa yang diperankan masyarakat lokal dalam menunjang perkembangan destinasi wisata Kapalo Banda
2. Mendapatkan informasi tentang manfaat yang diperoleh masyarakat lokal dengan berkembangnya objek wisata kapalo banda Nagari Taram.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang peran serta masyarakat lokal untuk pengembangan objek wisata
2. Menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam pembangunan sektor pariwisata umumnya dan wisata wilayah pedesaan khususnya.